



BPR INTERSKALA
PT BPR Interskala Mandri Sejahtera

LAPORAN TATA KELOLA

2025



**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR INTERSKALA MANDIRI SEJAHTERA**



**Periode : Januari – Juni
Tahun : 2025**



PT. BPR INTERSKALA MANDIRI SEJAHTERA
KOMPLEK RUKO GREEN LAKE CITY, RUKAN GREAT WALL, BLOK A NO.51
Kel. Gondrong, Kec. Cipondoh, Kota. Tangerang, Provinsi Banten 15147
Telp : 021 – 38764081, WA : 081119931122

bankinterskala.com bprims@interskala.com bank_interskala

Tangerang, 29 Juli 2025

Nomor : 034/IMS/VII/2025

Kepada Yth,
Perbarindo dan Majalah Media BPR
Di - Tempat

Perihal : Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Interskala Mandiri Sejahtera

Dengan hormat,

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 9 tahun 2024 tentang penerapan Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang penerapan Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat , dengan ini kami PT. BPR Interskala Mandiri Sejahtera menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola Periode Semester I Tahun 2025 pada Web SIP Perbarindo.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR Interskala Mandiri Sejahtera



Fransisca Whina Fetiana
Direktur

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR.....	2
A. Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assessment) atas Penerapan Tata Kelola	2
B. Pengungkapan penerapan Tata kelola	2
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	2
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	4
3. Kelengkapan dan pelaksanaan Tugas Komite	4
a. Tugas, Tanggung Jawab, Program kerja dan Realisasi Program Kerja Komite.....	4
b. Struktur, keanggotaan, keahlian dan Independen Anggota Komite	5
c. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	5
1) Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR	5
2) Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR	6
d. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain...	6
e. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	6
1) Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR.....	6
2) Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	7
f. Hubungan keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	7
1) Hubungan Keluarga Anggota Direksi BPR	7
2) Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris BPR	7
H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah.....	8
I. Pelaksanaan rapat	8
J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	9
K. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud).....	9
L. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi.....	9
M. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	10
N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan kegiatan Lain	10

BAB I PENDAHULUAN

Pelaksanaan dan Penerapan Tata Kelola PT BPR Interskala Mandiri Sejahtera sebagai Bank/ Lembaga Intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Laporan pelaksanaan tata kelola PT BPR Interskala Mandiri Sejahtera dibuat secara berkala dalam rangka memenuhi kewajiban BPR terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.09 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Penerapan Tata Kelola merupakan faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan terhadap PT BPR Interskala Mandiri Sejahtera. Hal ini dilakukan terus menerus untuk berupaya meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mempertahankan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif. Penilaian atas penerapan Tata kelola dengan metode Penilaian sendiri (*self assesment*) berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung.

PT BPR Interskala Mandiri Sejahtera pelaksanaan kegiatan harus memastikan bahwa seluruh bagian dalam perusahaan telah melaksanakan prinsip – prinsip tata Kelola perusahaan yaitu antara lain :

1. Keterbukaan (*transparency*)
2. Akuntabilitas (*accountability*)
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)
4. Independensi (*independency*).
5. Kewajaran (*fairness*)

Untuk tercapainya BPR yang sehat, maju, dan berkembang maka dengan ini PT BPR Interaskala Mandiri Sejahtera berkomitmen untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada dan tetap berusaha melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik *TATA KELOLA (GCG)* dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi dengan berlandaskan kepada 5 (lima) prinsip dasar GCG.

BAB II
FORMAT LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

A. Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assessment) atas Penerapan Tata Kelola

Nama	PT BPR INTERSKALA MANDIRI SEJAHTERA
Alamat BPR	Komplek Ruko Green Lake City Ruko Great Wall Blok A No. 51 Kel. Gondrong, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang
No Telp	021-38764081
Penjelasan Umum	Penerapan Tata Kelola dilaksanakan Penilaian Sendiri posisi periode Semester I Tahun 2025
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2 (Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	Manajemen PT BPR Interskala Mandiri Sejahtera telah melakukan Penerapan Tata Kelola dan penilaian sendiri (Self Assesment) dengan peringkat 2 (Baik), Laporan Tata Kelola diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stake holder guna mengetahui Kinerja BPR, tingkat kepatuhan terhadap peraturan regulator, perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta melaksanakan prinsip dasar Tata kelola secara Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kesetaraan. mengingat Perkembangan industri Tata Kelola yang semakin meningkat dimasa yang akan datang risiko dan tantangan yang dihadapi oleh Industri perbankan. dalam hal penerapan pada prinsip tata kelola masih terdapat kelemahan namun masih dapat diatasi dengan baik oleh Manajemen PT BPR Interskala Mandiri Sejahtera

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
	Nama	:	Fransisca Whina Fetiana
	Jabatan	:	Direktur Operasional Merangkap Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab sebagai Direktur Operasional		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola BPR sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPR dan peraturan perundang-undangan; 2. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya; 3. Menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 		

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional dengan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain 5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 6. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai; 7. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. 8. Membina hubungan baik dengan Bank Umum dan/atau BPR lainnya.
	Tugas dan Tanggung Jawab sebagai Direktur Yang Menjalankan Kepatuhan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati- hatian, termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain. 2. Menetapkan langkah- langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha BPR pada setiap jenjang organisasi. 3. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. 4. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain. 5. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundangundangan lain yang relevan. 6. Mencegah Direksi BPR untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lain. 7. Memberikan arahan strategis, pedoman dan kebijakan manajemen risiko sesuai dengan perkembangan usaha terkini, prinsip kehati- hatian dan berdasarkan pada karakteristik risiko BPR sehingga dapat mengidentifikasi, memantau, mengendalikan, dan mengelola risiko secara tepat dan efisien secara komprehensif. 8. Mengawasi seluruh aspek pertahanan lini kedua (2nd line of defence) BPR dalam fungsi manajemen risiko kredit dan memastikan implementasi yang efektif dari kerangka kerja manajemen risiko kredit BPR yang menyeluruh. 9. Merencanakan, mengembangkan, mengelola, dan mengarahkan pelaksanaan proses dan strategi, kebijakan, administrasi kredit, kerangka kerja, dan metodologi manajemen kredit secara komprehensif untuk memastikan risiko kredit yang dilakukan berada dalam Risk Appetite BPR.
	Tindak Lanjut Dewan Komisaris
	<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Rencana Bisnis Tahun 2025 2. Memastikan Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis. 3. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis dan perubahan Rencana Bisnis Tahun 2024 4. Melakukan langkah-langkah penguatan terhadap sistem pengendalian intern agar temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan tidak terjadi secara berulang.

- | | |
|--|---|
| | <p>5. Hasil temuan Audit Intern telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing</p> <p>6. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat.</p> <p>7. Memelihara Kecukupan Modal minimum dengan menjaga Cash Rasio</p> <p>8. Memelihara tingkat likuiditas pada level yang aman.</p> <p>9. Memperkuat sistem pengendalian internal (Internal control)</p> |
|--|---|

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
	<p>Nama : Hadi Sunardi</p> <p>Jabatan : Komisaris</p>
	Tugas dan Tanggung Jawab sebagai Komisaris
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan pengawasan atas prosedur-prosedur yang dipergunakan. 2. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi serta pemberian nasihat kepada Direksi. 3. Penilai atau pemberi rekomdasi tentang manajemen risiko Bank. 4. Memberikan pendapat kepada RUPS mengenai masalah strategis atau yang dianggap penting. 5. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi, termasuk laporan hasil audit internal/eksternal. 6. Menilai Kinerja Direksi dalam mengelola BPR. 7. Menanyakan/meminta penjelasan kepada Direksi mengenai kepengurusan. 8. Mengambil keputusan di dalam maupun diluar rapat Komisaris. 9. Melakukan pengawasan menyeluruh atas pengurusan BPR yang dilakukan oleh Direksi. 10. Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit dan mengetahui permohonan kredit diatas batas wewenang Direksi sebagaimana yang tertuang dalam proposal ajuan kredit untuk diketahui Komisaris. 11. Memberi arahan dan petunjuk kepada Direksi. 12. Meminta Penjelasan dan/ atau pertanggungjawaban Direksi tentang perkembangan usaha Bank secara keseluruhan. 13. Berhak meminta mengadakan rapat untuk membahas berbagai permasalahan Bank demi Kemajuan usaha. 14. Melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh perusahaan. 15. Menyusun laporan hasil pengawasan yang telah dilakukan untuk menilai keberhasilan Direksi dalam menjalankan Rencana Kerja dan Anggaran. 16. Mengkoordinasi penyelesaian atas temuan audit OJK dan/atau instansi lain.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite*)	
1	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung Jawab	:

	Program Kerja	:	
	Realisasi	:	
	Jumlah Rapat	:	
2	Komite Pemantau Risiko		
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	
	Program Kerja	:	
	Realisasi	:	
	Jumlah Rapat	:	
3	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	
	Program Kerja	:	
	Realisasi	:	
	Jumlah Rapat	:	
4	Komite Manajemen Risiko		
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	
	Program Kerja	:	
	Realisasi	:	
	Jumlah Rapat	:	
5	Komite Lainnya**)		
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	
	Program Kerja	:	
	Realisasi	:	
	Jumlah Rapat	:	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No	NIK *)	Nama	Keahlian **)	Komite***)					
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	Pihak Independen (Ya/Tidak)
1									
2									
dst									
Penjelasan Lebih Lanjut :									
BPR Tidak terdapat fungsi komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi dikarenakan Modal Inti kurang dari 50 M									

c. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	3201075906860009	Fransisca Whina Fetiana	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				

	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPR Interskala Mandiri Sejahtera
--	--

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	3275082709660007	Hadi Sunardi	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris sudah tidak memiliki saham pada BPR Interskala Mandiri Sejahtera				

d. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	3201075906860009	Fransisca Whina Fetiana	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain					

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	3275082709660007	Hadi Sunardi	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain					

e. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Fransisca Whina Fetiana	3201075906860009	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Seluruh Anggota Direksi BPR Interskala Mandiri Sejahtera tidak memiliki Hubungan Keuangan dengan Anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.					

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3275082709660007	Hadi Sunardi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :		Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Direksi, antar Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham.			

f. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3201075906860009	Fransisca Whina Fetiana	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :		Seluruh Anggota Direksi BPR Interskala Mandiri Sejahtera tidak memiliki Hubungan Keluarga dengan Anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.			

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3275082709660007	Hadi Sunardi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :		Seluruh Anggota Dewan Komisaris BPR Interskala Mandiri Sejahtera tidak memiliki Hubungan Keluarga dengan Anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.			

G. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Komisaris	
		Jumlah orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	1	Rp. 132.000.000,-	1	Rp. 58.500.000,-
2	Tunjangan	1	Rp. 48.000.000,-	1	Rp. 0
3	Tantiem	1	Rp. 0	1	Rp. 0
4	Kompensasi berbasis Saham	1	Rp. 0	1	Rp. 0
5	Remunerasi Lainnya	1	Rp. 0	1	Rp. 0

Total Remunerasi		Rp. 180.000.000,-		Rp. 58.500.000,-
Jenis Fasilitas Lain				
Perumahan	1	Rp. 0	1	Rp. 0
Transportasi	1	Rp. 0	1	Rp. 0
Asuransi Kesehatan	1	Rp. 4.464.000,-	1	Rp. 0
Fasilitas Lainnya***)	1	Rp. 0	1	Rp. 0
Total Fasilitas Lain		Rp. 4.464.000,-		Rp. 0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		Rp. 184.464.000,-		Rp. 58.500.000,-

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan (a/b):1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	0.37 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2.18 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.08 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	6.71 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1.77 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	

I. Pelaksanaan Rapat dalam semester I Periode Januari s/d Juni 2025

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	17 Jan 2025	2	Rapat bersama Direksi membahas kondisi BPR
2	09 April 2025	2	Rapat bersama Direksi membahas kondisi BPR
Penjelasan Lebih Lanjut selama semester I Tahun 2025 :			
Rapat dewan Komisaris dan Direksi membahas tentang : <ul style="list-style-type: none"> a. Realisasi RBB untuk mengetahui angak perbandingan antara realisasi dan rencana yang telah ditentukan sehingga dapat menilai pertumbuhan BPR. b. Membahasa hasil temuan Audit Internnal dan Audit Eksternal untuk memastikan ketentuan juga kecukupan internal control serta aspek risiko pada pelaksanaan kerja c. Membahas tentang peningkatan pengawasan terhadap debitur NPL dengan melakukan penagihan secara intensif dan melakukan kunjungan ke lokasi usaha, agar dapat mengetahui kondisi usaha debitur agar rasio Non Performing Loan (NPL) turun. d. Membahas realisasi perkembangan Sumber Daya Manusia. e. Meningkatkan pelayanan dan kualitas penerapan manajemen risiko serta mewujudkan Visi dan misi BPR. 			

J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	NIK	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Hadi Sunardi	3275082709660007	6	20	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
<p>Selama semester I Tahun 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2025, 30 Januari 2025, 13 Maret 2025, 09 April 2025, 07 Mei 2025, dan 13 Juni 2025. - Rapat dilakukan secara tatap muka langsung. - Rapat fokus dalam hal membahas kondisi BPR. - Pembahasan kegiatan yang dapat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha BPR serta melakukan evaluasi dan penerapan kebijakannya. 					

K. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal* (Dalam Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Sepanjang semester I Tahun 2025, tidak terdapat Penyimpangan Internal (Fraud) baik itu oleh Dewan Komisaris, Anggota Direksi ataupun Pegawai pada BPR Interskala Mandiri Sejahtera								

L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan lebih Lanjut :		
Selama Semester I tahun 2025 Tidak terdapat permasalahan secara hukum perdata dan pidana		

M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penjelasan Lebih Lanjut :									
Sepanjang semester I Tahun 2025 tidak terdapat Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan									

N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana Jumlah	NIK/NPWP*)	Jumlah (Rp)
1	-	-	-	-	-	-
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik :						
Selama Semester I Tahun 2025 belum ada pemberian dana untuk Segiataan Sosial maupun Kegiatan Politik.						

Demikianlah Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Interskala Mandiri Sejahtera periode Semester I Tahun 2025 ini disampaikan, sekian dan terima kasih.

Tangerang, 25 Juli 2025
 PT. BPR Interskala Mandiri Sejahtera

Mengetahui & Menyetujui,



 

Fransisca Whina Fetiana
 Direktur

Hadi Sunardi
 Komisaris